

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA TOMOHON

Cicilia Ilat
David P.E. Saerang.

(Email : ventje.ilat@yahoo.com)

ABSTRACT

The results based on a count coefficient for the linear regression equation by 0.639. This suggests that in this equation the model of 0.639 explained by the influence of the independent variables (the competence, independence and experience) on the dependent variable (performance inspectorate), while the remaining 36.1% is explained by other factors that are not included in this model , After testing the hypothesis with the t-test, it was concluded that the independence (X2) and experience (X3) significantly affect the performance of the inspectorate, while competence does not significantly affect the performance of the inspectorate. Furthermore, the F-test, showed that competence (X1), independence (X2) and experience (X3) jointly affect the performance of the inspectorate. The degree of influence of each variable appears in the regression coefficient that is competence (X1) of 0.059; independence (X2), amounting to 0.748 and the regression coefficient of variable experience (X3) of 1.087. Implikasi findings of this study is to boost the performance of inspectorates to create good financial management with efforts to increase the independence, experience for inspectorates and with due regard to the competence of the inspectorate as a qualification for functional inspectorate. Increased capacity, all three factors the results of this study need to be done jointly for mutually complementary.

Keywords: performance inspectorate, competence, independence and experience

I PENDAHULUAN

Upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah, mendorong dibangunnya sistem manajemen organisasi pemerintahan berbasis kinerja. Hal ini merupakan bagian dari upaya reformasi yang dilaksanakan pemerintah. Tujuan dibangunnya sistem manajemen berbasis kinerja agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai salah satu agenda utama reformasi sektor publik di Indonesia semenjak terjadinya peralihan dari sistem pemerintahan yang cenderung *otoriter-militeristik* ke pemerintahan demokratis. Semangat untuk meningkatkan kualitas layanan publik oleh pemerintahan yang bersih (*clean government*) tercermin dengan adanya perubahan radikal sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralistik ke desentralistik dengan ditetapkannya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan yang kemudian diganti dengan UU No.23/2004 dan UU No. 33/2004. Di samping untuk meredam wacana separatis, perubahan struktur dari sentralistik menjadi desentralistik ini pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatkan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan.

Hal ini nampak dari upaya aparatur pemerintahan untuk (1) melaksanakan reformasi birokrasi; (2) menegakkan dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang prima; dan (4) memberantas korupsi sekarang juga mulai dari diri sendiri dan hindari perbuatan tindak pidana korupsi (Efendy, 2010).

Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan ini, semakin giat dilaksanakan baik melalui upaya hukum, maupun lewat kegiatan-kegiatan pelatihan yang lakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga lainnya. Semuanya ini dilakukan untuk mempercepat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Selanjutnya, pemerintah melaksanakan kebijakan desentralisasi politik dan desentralisasi pengelolaan keuangan sebagai upaya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Karena sektor pemerintah tidak lepas dari kepentingan umum maka pengukuran kinerja mutlak dilakukan, yang diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasilnya pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dari perpektif internal organisasi pemerintah pengukuran

kinerja sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Pengukuran kinerja di sektor pemerintah dibutuhkan untuk mengukur seberapa berhasilnya pelaksanaan fungsi pemerintah. Untuk memberikan kepastian keberhasilan pemerintah tersebut, dilakukan pendendalian dan pemeriksaan yang dalam hal ini dilakukan oleh inspektorat.

Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005 dalam Efendy 2010). Boynton (dalam Efendy, 2010) menjelaskan bahwa fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan pengalaman. Ketiga hal ini dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor internal.

Kinerja auditor internal merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan. Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan auditor internal merupakan gambaran terhadap kualitas pemeriksaan (audit). Untuk itu seorang auditor internal harus memiliki beberapa kualifikasi, seperti:

- a). Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang audit (Bedard, 1986 dalam Lastanti, 2005).
- b). Auditor yang memiliki tingkat independensi yang tinggi berarti tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (Mulyadi, 2008:26 dalam Sapariyah, 2011).
- c). Pengalaman berupa keterampilan dan pengetahuan akan diperoleh auditor apabila melaksanakan suatu pekerjaan yang sama secara terus menerus. Herliyansyah dan Ilyas, 2006 dalam Singgih, 2010) menjelaskan bahwa semakin banyak tugas yang dikerjakan, akan semakin membentuk dan mengasah keahlian seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan sehingga menjadikannya lebih bijaksana baik berpikir maupun bertindak sehingga kinerja aparat yang dihasilkan akan semakin baik.

Inspektorat dalam fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 (PSEKP, 2007:1 dalam Efendy, 2010) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, mewajibkan setiap laporan keuangan pemerintah daerah direviu oleh APIP sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direviu kemudian disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, menyatakan pengukuran kinerja aparat atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, dapat menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: "Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan". Pernyataan Standar Pemeriksaan ini menyatakan bahwa semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh para pemeriksa, secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut (Efendy, 2010).

Kesadaran akan pentingnya lembaga "Inspektorat" sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dan akuntabel telah menjadi bagian dari strategi pembangunan Kota Tomohon. Inspektorat Kota Tomohon sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Tomohon menurut *Peraturan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Inspektorat Kota Tomohon*, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Tomohon, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan kota. Visi dari Inspektorat adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sedangkan yang menjadi misi adalah mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan bebas dari KKN. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana fungsinya tersebut, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Kinerja aparat Inspektorat Kota Tomohon dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Tomohon pada waktu lalu dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan masih banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil temuan BPK (Tahun Anggaran 2011) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain didapatkan hasil berupa adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dan kesalahan administrasi dalam hal pelaporan keuangan. Pengalaman tiga tahun terakhir (Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011), Kota Tomohon oleh BPK memperoleh penilaian *disclaimer* dalam hal pengelolaan keuangan. Walaupun pada tahun-tahun terakhir ini penilaian pengelolaan keuangan Kota Tomohon mulai membaik. Hal ini tidak lepas dari peranan inspektorat Kota Tomohon dalam melaksanakan fungsinya sebagai internal auditor. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan pemerintah kota Tomohon sebagai suatu salah indikator bagi kinerja aparat inspektorat kota Tomohon.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja inspektorat sebagai internal auditor adalah kompetensi aparat, independensi aparat, dan pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai internal auditor. Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN menjelaskan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Dalam hal ini dalam melakukan tugas internal auditor, pemeriksa perlu memiliki kompetensi yang memadai (Efendy, 2010). Selanjutnya dalam pernyataan standar umum kedua, "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya". Arens, *et al.*, (2000) dalam Efendy (2010), mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai "Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit". Sedangkan menurut Mulyadi (2008:26) dalam Sapariyah (2011), independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Selanjutnya, pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Knoers dan Haditono, 1999 dalam Asih, 2006). Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang diteliti dalam ini penelitian ini dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian:

1. Apakah faktor kompetensi mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah faktor independensi mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah faktor pengalaman mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah?

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1. Pengertian Audit

Istilah audit berasal dari kata "*audere*" pada awalnya yang berarti mendengar, diambil dari praktek Raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/Menteri keuangannya. Lama kelamaan kata *audere* yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan.

Sejalan dengan berkembangnya dunia perekonomian, dimana ukuran kinerja keuangan dan berkembangnya organisasi yang semakin besar dan dengan bertambah rumitnya urusan pemerintahan, maka kegiatan pemerik-saan diserahkan kepada orang yang ahli/kompeten dan independen. Pihak yang mengaudit disebut dengan *auditor* dan pihak yang diaudit disebut auditi, sedangkan ilmu mengenai audit disebut auditing. Dalam perkembangan *auditing* pada awalnya dilakukan terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan yang disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk meyakini apakah laporan tersebut didukung dengan bukti yang cukup/lengkap dan sah serta disajikan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku. Selanjutnya lingkup kegiatan audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, melainkan meluas menjadi audit kepatuhan, audit operasional, audit kecurangan (*fraud*), audit dalam rangka membantu penyidikan (*forensic audit*), dan sebagainya. Walaupun masing-masing jenis audit memiliki tujuan yang berbeda, namun pada dasarnya, sasaran awalnya adalah untuk meyakini keandalan (layak dipercaya atau tidaknya) informasi yang diaudit, sehingga secara umum audit dapat diartikan sebagai: “Aktivitas pengumpulan dan pengujian data, yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, dalam rangka menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan, untuk disampaikan kepada para pihak yang membutuhkan/ berkepentingan”.

2.1.2. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan *good governance* dan *clean government* sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 308, dikatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004 dalam Efendy 2010). Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi, tugas dan fungsinya melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah yakni oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawas intern pemerintah yakni oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APIP diharapkan memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan. Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kedua, Inspektorat Jenderal Departemen; ketiga, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian; dan keempat, Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota (Susmanto, 2008 dalam Efendy, 2010).

Berdasarkan obyek pengawasan, Cahyat (2004) dalam Efendy 2010, mengemukakan bahwa pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah yaitu melakukan pengawasan keuangan. Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, serta inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

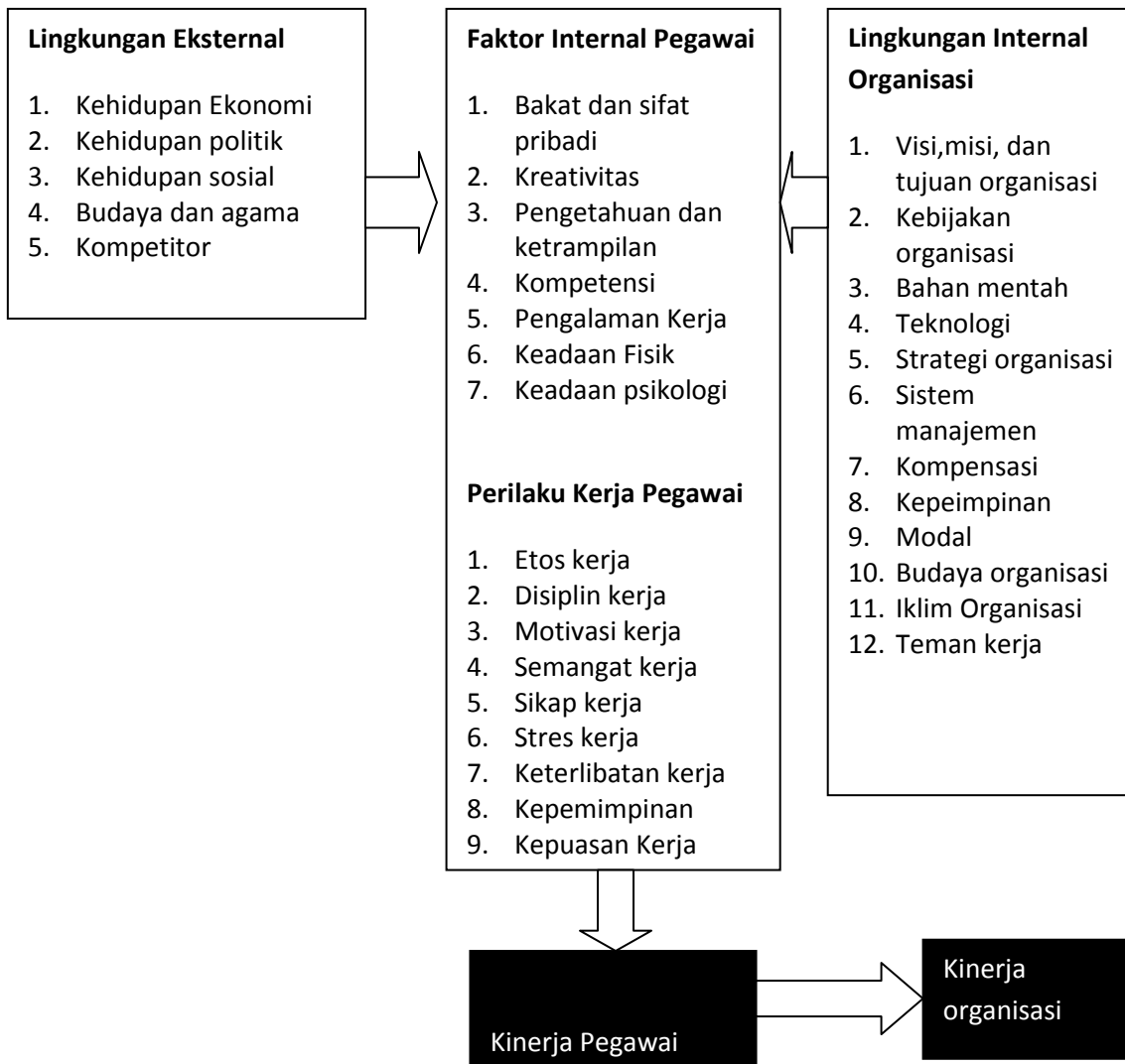
2.1.3. Kinerja Inspektorat Dan Kualitas Audit

Kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wirawan, 2009). Dengan demikian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategik organisasi.

Selanjutnya kinerja sering digunakan untuk menyatakan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Suatu pekerjaan atau profesi mempunyai sejumlah fungsi atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan tersebut. Indikator pekerjaan seorang manajer adalah merencanakan pekerjaan, mengorganisasi pekerjaan, memimpin pelaksanaan pekerjaan, dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan. Sehingga kinerja seorang manajer adalah jumlah keluaran dari indikator-indikator pelaksanaan profesinya sebagai pegawai. Kinerja pegawai merupakan hasil sinergi sejumlah faktor, seperti faktor internal lingkungan organisasi, faktor lingkungan eksternal, dan faktor internal pegawai. Hubungan masing-masing faktor tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 2.1.

Sebagaimana pada gambar 2.1. dapat dilihat bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor internal pegawai, faktor lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal. Secara implisit dapat dilihat bahwa Kinerja pegawai dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor Internal Pegawai seperti bakat dan sifat pribadi, kreativitas, pengetahuan dan ketrampilan, kompetensi, pengalaman kerja, keadaan fisik, keadaan psikologi; dan perilaku kerja karyawan, yang meliputi etos kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, semangat kerja, sikap kerja, stres kerja, keterlibatan kerja, kepemimpinan.

Gambar 2.1. Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal terhadap Perilaku Kerja Pegawai



Sumber: Wawan (2009)

Inspektorat sebagai aparat pemerintah yang merupakan bagian dari sistem organisasi akan menentukan keberhasilan/kinerja organisasi. Dalam tugas sebagai auditor, kinerjanya akan dipengaruhi oleh faktor Internal Pegawai (inspektorat) seperti: bakat dan sifat pribadi, kreativitas, pengetahuan dan ketrampilan, kompetensi, pengalaman kerja, keadaan fisik, keadaan psikologi; dan perilaku kerja karyawan, yang meliputi etos kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, semangat kerja, sikap kerja, stres kerja, keterlibatan kerja, kepemimpinan. Selanjutnya terdapat dua aspek utama kinerja pegawai yaitu kualitas dan kuantitas yang dicapai pegawai persatuan waktu, berdasarkan tanggung jawabnya (Rao, 1996, Mangkunegara 2000, Ruki 2002).

Berkaitan kinerja inspektorat dan dikaitkan dengan hasil kerjanya, maka kualitas hasil kerja dapat dilihat dan tercermin pada audit. Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit yang merupakan hasil kinerja secara obyektif. Hal ini dikarenakan kualitas audit yang dikaitkan dengan kinerja inspektorat merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali sulit untuk menentukan sifat dan kualitasnya.

Berkaitan dengan kualitas hasil pemeriksaan laporan keuangan, De Angelo (dalam Alim *et al.*, 2007) mendefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*. Sedangkan Deis dan Groux (dalam Alim *et al.*, 2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Selanjutnya kinerja inspektorat yang dikaitkan dengan kualitas audit menurut *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit dalam sektor publik, sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon *et al.*, 2005 dalam

Efendy 2010). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas pemeriksaan atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 SPKN (Paragraf 7) disebutkan bahwa: “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan” (Efendy, 2010).

Hal pengukuran kinerja inspektorat sebagai auditor memerlukan indikator-indikator antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis yang dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*, tergantung pada kemampuan teknis, independensi auditor dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan.

III KERANGKA KONSEPTUAL

Kompetensi dalam pengauditan merupakan kecakapan profesional yang memadai dalam bidang audit sehingga auditor dapat mengerjakan tugasnya dengan obyektif, mudah, cepat, intuitif dan jarang melakukan kesalahan. Independensi dalam pengauditan adalah sikap bebas dalam mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi seorang auditor dalam melakukan audit sehingga dapat menghasilkan laporan pemeriksaan yang akurat dan dapat diandalkan.

Pengalaman dalam pengauditan adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh, yang membentuk dan mengasah keahlian seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan sehingga menjadikannya lebih bijaksana baik dalam berpikir maupun bertindak sehingga kinerja inspektorat akan semakin baik dan meningkat. Kinerja Inspektorat merupakan kemampuan sebagai auditor untuk menemukan dan memberikan jalan keluar atas pelanggaran terhadap aturan pemerintah dalam bidang akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan.

3.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

3.2.1. Hubungan Kompetensi dengan Kinerja Auditor

Dalam Pernyataan standar umum pertama SPKN dikatakan bahwa: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang kompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki kecakapan profesional yang memadai dalam bidang audit sehingga dapat mengerjakan tugasnya dengan mudah, cepat, intuitif dan jarang melakukan kesalahan. Berdasarkan hal ini dikemukakan hipotesis sbb:

H₁: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

3.2.2 Hubungan Independensi dengan Kinerja Auditor

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Sedangkan menurut Christiawan (2002), seorang akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi

juga pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya. Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa seorang auditor dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya, juga tidak mudah dipengaruhi, jujur dan tidak memihak pada siapapun agar menghasilkan suatu laporan pemeriksaan yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat independensi seorang auditor akan meningkatkan kinerja inspektorat dalam melakukan pemeriksaan dengan baik. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

3.2.3. Hubungan Pengalaman dengan Kinerja Auditor

Herliyansyah dan Ilyas (2006) dalam Singgih 2010, mengatakan bahwa penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang dapat memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik. Secara psikis, pengalaman akan membentuk pribadi seseorang, yaitu akan membuat seseorang lebih bijaksana baik dalam berpikir maupun bertindak, karena pengalaman seseorang akan merasakan posisinya saat dia dalam keadaan baik dan saat dia dalam keadaan buruk. Seseorang akan semakin berhati-hati dalam bertindak ketika ia merasakan fatalnya melakukan kesalahan. Dia akan merasa senang ketika berhasil menemukan pemecahan masalah dan akan melakukan hal serupa ketika terjadi permasalahan yang sama. Dia akan puas ketika memenangkan argumentasi dan akan merasa bangga ketika memperoleh imbalan hasil pekerjaannya (Bonner dan Lewis, 1990; dalam Singgih, 2010). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman akan membentuk dan mengasah keahlian seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dan menjadikannya lebih bijaksana baik dalam berpikir maupun bertindak sehingga mendorong auditor melakukan tugas semakin baik. Sehingga hipotesis pengaruh faktor pengalaman aparat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kinerja Inspektorat di Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

3.3. Model Penelitian

Tahapan pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan perhitungan profil responden, statistik deskripsi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda, dengan alasan penggunaan variabel yang lebih dari satu dalam penelitian ini. Secara umum formulasi dari regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

dimana:

- Y : Kinerja Inspektorat
- a : Nilai intersep (konstan)
- b : Koefisien arah regresi
- X₁ : Kompetensi Inspektorat
- X₂ : Independensi Inspektorat
- X₃ : Pengalaman Kerja Inspektorat
- e : error

IV METODE PENELITIAN

4.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kota Tomohon yang ikut dalam tugas pemeriksaan, yaitu sebanyak 36 orang. Alasan pemilihan Kota Tomohon sebagai lokasi penelitian adalah karena pengelolaan keuangan daerah kota Tomohon yang sebelumnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapat opini *Disclaimer* oleh BPK dan membaik meningkat mendapat opini Wajar dengan pengecualian, berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah Kota Tomohon. Hal ini menunjukkan peran Inspektorat kota Tomohon dalam melakukan fungsi pengawasan lebih baik.

Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 36 kuesioner. Karena jumlah populasi sedikit, maka semua populasi akan dijadikan sampel. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, dimana penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi.

4.2 Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kota Tomohon sedangkan variabel independennya terdiri dari kompetensi Inspektorat (X1), independensi Inspektorat (X2), dan pengalaman Inspektorat (X3).

Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah:

1. Kompetensi Inspektorat

Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan Inspektorat untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi Inspektorat dikelompokkan menjadi pengetahuan umum, keahlian khusus, dan kompetensi bidang audit diukur dengan menggunakan enam item pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi Inspektorat terhadap kompetensi yang dimilikinya terkait penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, wawasan organisasi pemerintahan, serta program peningkatan keahlian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi ini diadopsi dari penelitian Harhinto (2004) dalam Efendy (2010) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN. Responden diminta menjawab bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban yaitu sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin.

2. Independensi auditor

Independensi dalam penelitian ini adalah pemeriksa bebas dari gangguan pribadi/tidak memiliki hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa, tidak adanya batasan waktu yang tidak wajar dalam penyelesaian pemeriksaan, bebas dari hambatan independensi, dan tidak adanya campur tangan pihak ekstern dalam penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa. Instrumen yang digunakan untuk mengukur independensi ini diadopsi dari penelitian Harhinto (2004) dalam Efendy (2010) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN. Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban yaitu sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala *Likert* 5 poin.

3. Pengalaman auditor

Pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal secara berulang-ulang sehingga dapat mengasah kemampuan dan keahlian seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan. Dalam kuesioner, variabel pengalaman akan diukur dengan menggunakan beberapa pernyataan berdasarkan tinjauan pustaka yang ada, misalnya yang diungkapkan oleh Aji (2009) dan pendapat oleh Herliyansyah dan Ilyas (2006) dalam Singgih (2010). Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban yaitu sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala *Likert* 5 poin, dengan kategori penilaian sebagai berikut :

4. Kinerja Inspektorat

Kinerja Inspektorat merupakan capaian kegiatan dalam melakukan pemeriksaan, yang meliputi kemampuan untuk menyusun program, waktu pelaksanaan lapangan, penyusunan kertas kerja, penyusunan laporan, dan kemampuan melakukan konfirmasi tindak lanjut hasil temuan audit dan capaian rencana program kerja. Item-item tersebut diukur dengan menggunakan delapan item yang menggambarkan persepsi inspektorat terhadap kinerja inspektorat, manfaat audit dan tindak lanjut hasil audit. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja inspektorat dimodifikasi berdasarkan SPKN. Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban yaitu sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala *Likert* 5 poin, dengan kategori penilaian berikut :

4.3 Pengambilan atau Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor pada Inspektorat di

Kota Tomohon. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah pengiriman kuesioner disertai dengan surat permohonan kepada Inspektur Kota Tomohon disertai penjelasan tentang tujuan penelitian yang akan dilakukan. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban sesungguhnya dengan lengkap. Pengiriman kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti. Dalam menjalankan kuesioner, peneliti mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan data responden dikarenakan banyaknya responden yang sering turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan ada yang sakit karena kecelakaan selama 3 bulan, sehingga waktu pengumpulan kuesioner menjadi lama dan informasi sulit didapatkan.

4.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresinya adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

β_0 = intersep atau konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

X1 = kompetensi

X2 = independensi

X3 = pengalaman

e = error

Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi, independensi, dan pengalaman inspektorat terhadap variabel dependen yaitu kinerja inspektorat, dilakukan dengan uji simultan dan uji parsial.

a. Uji simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti variabel bebas secara tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Uji F dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel (n-k-1)}$, maka H_a diterima. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Selanjutnya, jika $F_{hitung} < F_{tabel (n-k-1)}$, maka H_0 ditolak. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (Y).

b. Uji parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (kompetensi, independensi dan pengalaman) terhadap variabel dependen (kinerja Inspektorat Kota Tomohon). Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

$H_0 : \beta_1 = 0$, berarti kompetensi secara tidak signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, berarti kompetensi secara signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

$H_0 : \beta_2 = 0$, berarti independensi secara tidak signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, berarti independensi secara signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

$H_0 : \beta_3 \neq 0$, berarti pengalaman secara tidak signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

Ha : $\beta_2 \neq 0$, berarti pengalaman secara signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

V ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

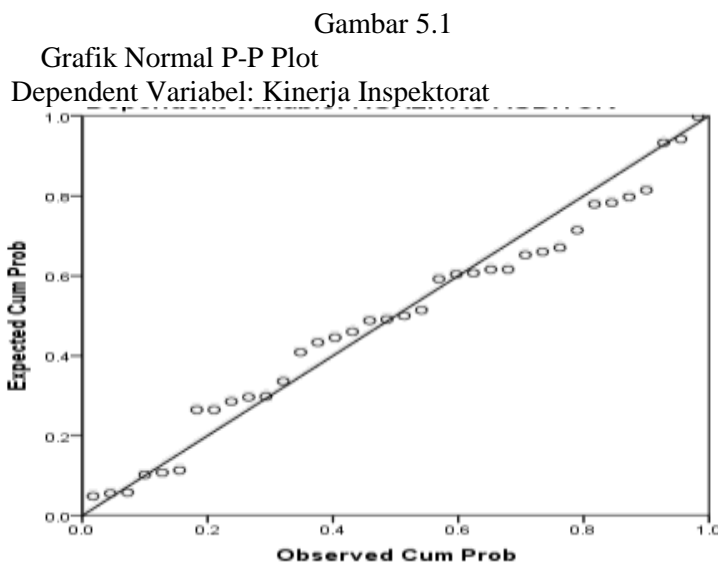
5.1 Hasil Penelitian

5.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penggunaan model perlu dilakukan uji normalitas. Hal ini maksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satunya dengan cara yang paling sederhana adalah dengan melihat grafik normal P-P Plot (Ghozali 2001:75 dalam Efendy 2010). Normal P-P plot dapat dilihat pada Gambar 5.1 dibawa ini.

Berdasarkan grafik normal plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Jadi berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak dipakai dalam penelitian.



Sumber : Hasil Olahan,2014

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dalam satu persamaan regresi. Suatu model regresi yang baik dicirikan dengan tidak ada masalah multikolinearitas. Masalah multikolinearitas dapat dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali 2001:57 dalam Efendy 2010). Berikut ini adalah tabel model regresi nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Berdasarkan Tabel 5.2, dapat disimpulkan semua variabel mempunyai nilai VIF < 10 (Kompetensi 0,996; Independensi 0,926 dan Pengalaman 0,923), artinya semua variabel independent tersebut tidak terdapat hubungan multikolinearitas.

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan *Tolerance* dan VIF
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics
-------	-------------------------

		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KOMPETENSI	.996	1.003
	INDEPENDENSI	.926	1.080
	PENGALAMAN	.925	1.081

Dependent Variable: KINERJA INSPEKTORAT

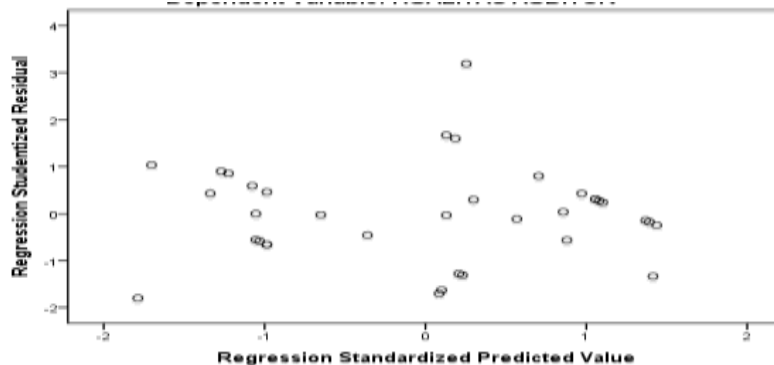
Sumber : data Hasil Olahan SPSS

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar (Ghozali, 2001 dalam Efendy 2010).

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang) atau pola tertentu yang jelas, hal ini berarti terjadi heteroskedastisitas. Gambar 5.2 adalah hasil dari grafik *scatterplot*:

Gambar 5.2 Grafik Scatterplot



Dependent Variabel: Kinerja Inspektorat

Sumber : data Hasil Olahan SPSS Version 20.00

Berdasarkan Gambar 5.2, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada gambar 5.2, dimana titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola yang teratur atau tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Analisis Regresi Berganda

Dengan hasil uji asumsi klasik pada uraian sebelumnya, dimana dapat hasil secara keseluruhan menunjukkan model regresi yang dipakai memenuhi asumsi klasik. Dengan demikian dapat dilakukan analisa regresi yang selanjutnya akan diinterpretasi hasil model regresi berganda tersebut.

Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen kompetensi (X1), independensi (X2), dan pengalaman (X3) terhadap variabel dependen kinerja inspektorat (Y). Hasil analisis regresi berganda seperti tampak pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Hasil Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

	(Constant)	2.696	4.953		.543	.592
1	KOMPETENSI	.059	.151	.038	.390	.698
	INDEPENDENSI	.748	.185	.423	4.037	.000
	PENGALAMAN	1.087	.191	.601	5.727	.000

Sumber : Data Olahan, 2014

Berdasarkan data tabel 5.3, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,696 + 0,59X_1 + 0,748X_2 + 1,087X_3 + e$$

Keterangan :

Y = variabel kinerja inspektorat

a, b = koefisien korelasi

X1 = variabel kompetensi

X2 = variabel independensi

X3 = variabel pengalaman

e = *error*

Berdasarkan persamaan regresi berganda dapat dikemukakan bahwa variabel kompetensi, independensi dan pengalaman berpengaruh positif terhadap kinerja inspektorat di Kota Tomohon. Selanjutnya dengan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kinerja inspektorat (Y) mempunyai hubungan positif atau searah dengan variabel independen yaitu variabel kompetensi (X1), independensi (X2), dan pengalaman (X3).

Koefisien regresi kompetensi (X1), sebesar 0,059 dan mempunyai nilai positif atau searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel kompetensi (X1), maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja inspektorat (Y) dengan asumsi faktor lain konstan.

Koefisien regresi independensi (X2), sebesar 0,748 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel independensi (X2), maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja inspektorat (Y) dengan asumsi faktor lain konstan.

Begitu juga dengan koefisien regresi variabel pengalaman (X3), sebesar 1.087 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Pengalaman (X3), maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja inspektorat (Y) dengan asumsi faktor lain konstan.

Uji F

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan uji F. Dari hasil *output* hitung koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui nilai F seperti pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	233.259	3	77.752	22.213	.000 ^b
	Residual	111.966	32	3.489		
	Total	345.212	35			

a. Dependent Variable: KINERJA INSPEKTORAT

b. Predictors: (Constant), PENGALAMAN, KOMPETENSI, INDEPENDENSI

Hasil tabel 5.4., menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 22.213 yang lebih besar dari F_{tabel} 1,764 atau tingkat signifikan 0,0. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi dan pengalaman inspektorat secara signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat, dengan tingkat signifikan 0,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi, independensi dan pengalaman secara bersama-sama signifikan mempengaruhi kinerja Inspektorat di Kota Tomohon.

. Uji t

Dari analisis regresi *output* dapat disajikan pada 5.5. dimana Tabel distribusi t pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi), dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ atau $(36-3-1) = 32$. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,355, dengan kriteria pengujian:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Tabel 5.5 Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.696	4.953		.543	.592
KOMPETENSI	.059	.150	.039	.390	.698
INDEPENDENSI	.749	.185	.423	4.037	.000
PENGALAMAN	1.087	.191	.601	5.727	.000

sumber : Data Olahan, 2014

Tabel distribusi t, pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi), dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ atau $(36-3-1) = 32$. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,355, dengan kriteria pengujian:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Pengujian hipotesis 1

Nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,390 < 2,355$) dan signifikansi $P = 0,698 > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak artinya secara parsial, variabel kompetensi (X_1) tidak signifikan mempengaruhi Kinerja Inspektorat (Y).

Pengujian hipotesis 2

Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,037 > 2,355$) dan signifikansi $P = 0,000 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial, variabel independensi (X_2) secara signifikan mempengaruhi Kinerja Inspektorat (Y).

Pengujian hipotesis 3

Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,727 > 2,355$) dan signifikansi $P = 0,000 > \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial variabel pengalaman (X_3) secara signifikan mempengaruhi Kinerja Inspektorat (Y).

Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari pengolahan data tampak pada Tabel 5.6, sebagai berikut:

Tabel 5.6 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.822 ^a	.674	.639	1.87043	1.584

a. Predictors: (Constant), PENGALAMAN, KOMPETENSI, INDEPENDENSI

b. Dependent Variable: KINERJA INSPEKTORAT

Sumber : Data Olahan, 2014

Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,639. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Inspektorat adalah sebesar 63,90%, sedangkan sisanya sebesar 36,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, misalnya akuntabilitas, etika, atau motivasi, tergantung penelitian yang dilakukan.

Pembahasan

Hasil penelitian dengan menggunakan uji F, diperoleh hasil bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman inspektorat sebagai auditor secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja inspektorat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penentu keberhasilan inspektorat sangat ditentukan oleh ketiga variabel yaitu kompetensi, independensi dan pengalaman. Hasil ini memberikan indikasi bahwa dalam meningkatkan kinerja inspektorat perlu meningkatkan kompetensi, independensi dan pengalaman.

Hasil penelitian ini mendukung apa yang dikemukakan dalam pernyataan standar umum pertama dalam SPKN mengemukakan bahwa “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dan sesuai dengan SPKN yang menyatakan bahwa: “Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki: Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan; Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan)” (paragraf 10) dan “Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa” (paragraf 11).

Selanjutnya berdasarkan uji t, diperoleh hasil bahwa kompetensi secara tidak signifikan mempengaruhi Kinerja Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini kompetensi inspektorat meliputi a) pengetahuan umum berkaitan dengan review analitis, teori organisasi, dan akuntansi sektor publik. b). Pengetahuan khusus, yang meliputi ketrampilan dalam komunikasi untuk melakukan pemeriksaan dan ketrampilan dalam olah data,dll, dan c) kompetensi di bidang audit yang meliputi Penguasaan Standar Akuntansi dan Auditing.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi di bidang Akuntansi dan Audit, tanpa diikuti oleh peningkatan kemampuan di bidang penunjang lainnya, seperti Hukum, Peraturan Pemerintah, Sosial Politik, Organisasi Pemerintah/Birokrasi maka tidak dapat mendukung peningkatan kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian faktor kompetensi inspektorat dalam meningkatkan kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, perlu melakukan pelatihan-pelatihan di bidang penunjang lainnya, tanpa mengabaikan kompetensi utama dari inspektorat (pemeriksa). Hasil penelitian ini yang mengemukakan bahwa kompetensi secara tidak signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat, mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman (2009), Fahdi (2012), walaupun penelitian ini menggunakan variabel kualitas hasil audit sebagai variabel dependen.

Selanjutnya untuk variabel independensi dan pengalaman berdasarkan uji hipotesis menyatakan secara signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat. Hal ini berarti faktor independensi dan pengalaman menjadikan faktor yang menentukan kinerja Inspektorat.

Semakin independennya inspektorat dalam melaksanakan fungsinya sebagai APIP, maka kinerja akan meningkat. Begitu juga dengan lamanya inspektorat dalam melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan maka dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Inspektorat. Dalam pernyataan standar umum kedua SPKN dikatakan bahwa: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua bahwa independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat dan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya independensi seorang auditor akan meningkatkan kinerja inspektorat, artinya kinerja inspektorat dapat dicapai jika auditor memiliki independensi yang baik.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa independensi secara signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bolang (2012), Mansur (2007), Alim et.al (2007), Aji (2009), Rahman (2009), Fahdi (2012), namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Efendy (2010). Hasil penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kompetensi disamping pengalaman inspektorat. Hasil

penelitian diperoleh ternyata pengetahuan tentang akuntansi dan audit dari inspektorat di Kota Tomohon masih rendah (sesuai dengan data tingkat pendidikan yang diperoleh, lihat tabel 5.1).

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis ini untuk variabel pengalaman yang secara signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bolang (2012), Mansur (2007), namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Aji (2009), Efendy (2010). Fahdi (2012) yang menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel dependen kualitas audit dan daerah/lokasi penelitian. Alasan ini memungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian. Dengan kata lain, Kualitas audit belum tentu menunjukkan kinerja inspektorat. Kinerja inspektorat dalam penelitian ini merupakan ukuran yang meliputi proses perencanaan audit, pelaksanaannya (lama dan kualitasnya), dan pelaporannya serta kemampuan untuk melakukan tindak-lanjut hasil temuan. Untuk itu diwaktu yang akan datang perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan hubungan kualitas audit dengan kinerja inspektorat, sehingga dapat peningkatan kinerja Inspektorat dapat tergambar dari hasil auditnya.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi, independensi, dan pengalaman secara simultan secara signifikan mempengaruhi kinerja inspektorat Kota Tomohon.
2. Kompetensi secara parsial, tidak signifikan mempengaruhi kinerja Inspektorat, hal ini dapat dipahami bahwa tugas inspektorat meliputi bidang keorganisasian, sosial politik, hukum, sehingga kompetensi bidang akuntansi saja belum dapat menunjang kinerja inspektorat.
3. Variabel Independensi secara parsial, signifikan mempengaruhi Kinerja Inspektorat. Hal ini berarti semakin meningkatnya independensi inspektorat akan meningkatkan kinerja inspektorat, artinya kinerja inspektorat dapat dicapai jika auditor memiliki independensi yang baik.
4. Variabel Pengalaman secara parsial, signifikan mempengaruhi Kinerja Inspektorat. Adanya pengaruh positif variabel pengalaman berarti semakin tinggi tingkat pengalaman auditor semakin tinggi pula Kinerja Inspektorat. Auditor yang berpengalaman cenderung memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain:

Untuk meningkatkan kinerja inspektorat dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah maka perlu meningkatkan kompetensi, independensi dan pengalaman secara simultan. Dalam merencanakan pemeriksaan perlu membentuk suatu tim yang saling melengkapi antara auditor yang mempunyai kompetensi yang tinggi/baik dengan junior, berpengalaman dan belum. Untuk pelaksanaan pelatihan bagi inspektorat maka perlu disiapkan bahan/materi Diklat yang dapat memberikan wawasan baik kompetensi, independensi maupun studi kasus sebagai bagian dari pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Tomohon bekerja sama dengan BAPPEDA Kota Tomohon, 2012. *Tomohon Dalam Angka (Tomohon in Figures) 2012*. BPS Kota Tomohon. 2012.

Bolang, Marietta Sylvie, 2012. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Tesis 2012

Christiawan, Y.J. 2002. *Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris*. Journal Directory : Kumpulan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unika Petra. Vol. 4 / No. 2.

- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD), 2013. 300 *Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi*, diakses 23 April 2013, <http://djkd.kemendagri.go.id/?jenis=news&p=detail_berita&id=861>
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*. Tesis 2010.
- Fahdi, Muhammad. 2012. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Tesis 2012.
- Lastanti Sri, Hexana. 2005. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005.
- Mansur, Tubagus. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari persepsi auditor atas pelatihan dan keahlian independensi dan penggunaan kemahiran profesional*. Tesis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Jakarta. 2007.
- No. 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. 2006.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta. 2008.
- Peraturan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2009. *Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Inspektorat Kota Tomohon*. Tomohon.
- Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, *Reviu Laporan Keuangan, Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah*. 2007.
- Romli, Lili. 2006. *Efektivitas Pemerintah Daerah Era Otonomi: Studi Kasus Efektivitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Kota Semarang*. Jurnal Desentralisasi Vol. 7, No. 4. 2006.
- Saifuddin. 2004. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasiekperimen pada Auditor dan Mahasiswa)*. Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sapariyah, Rina Ani. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor dan Komitmen Organisasi (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta)*. STIE "AUB" , Surakarta. 2011.
- Singgih, EM, dan IR Bawono, 2010. *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP "Big Four" di Indonesia)*. Universitas Jenderal Soedirman pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.